

## ABSTRAK

### Fadli Muhammad Pohan

Biro perjalanan haji dan umroh adalah usaha penyedia jasa perencanaan atau jasa pelayanan penyelenggaraan ibadah umroh. Biro perjalanan Umroh merupakan suatu badan usaha yang dapat memberikan pelayanan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan dunia perjalanan ibadah umroh.

Permasalahannya adalah pengaturan izin penyelenggaraan biro perjalanan ibadah haji dan umroh dalam peraturan perundang-undangan, tanggung jawab hukum atas biro perjalanan ibadah haji dan umroh atas jamaahnya yang sudah melunasi pembayaran serta pertimbangan hakim atas tindakan penipuan yang dilakukan dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 975 K/Pid/2021

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif. "Pendekatan yuridis normatif yaitu menekankan pada ilmu hukum dengan menitik beratkan pada data sekunder, untuk melengkapi data dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan yang relevan dan melakukan studi pustaka yang selanjutnya data akan dianalisis secara yuridis.

Disimpulkan bahwa Pengaturan izin penyelenggaraan biro perjalanan ibadah haji dan umroh dalam peraturan perundang-undangan, terdapat enam unsur pokok dalam penyelenggaraan ibadah haji yang harus di perhatikan: Calon haji, Pembiayaan, Kelengkapan administratif, Sarana transportasi, Hubungan bilateral antar negara, Organisasi pelaksana. Tanggung jawab hukum atas biro perjalanan ibadah haji dan umroh atas jamaahnya yang sudah melunasi pembayaran, Biro Umroh adalah Penyelenggara umroh yang telah mendapat izin dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Tanggung jawab meliputi 3 (tiga) tahap yaitu tanggung jawab sebelum keberangkatan, saat pemberangkatan dan setelah pemberangkatan. Tanggungjawab sebelum keberangkatan yaitu promosi, pendaftaran dan pembatalan. Tanggung jawab saat keberangkatan yaitu akomodasi. Tanggung jawab setelah keberangkatan adalah penyerahan sertifikat. Pertimbangan hakim atas tindakan penipuan yang dilakukan dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 975 K/Pid/202, alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi,. Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka *judex facti* telah tepat dalam menerapkan hukum dan tidak melampaui batas wewenangnya. Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak.

Kata Kunci : Analisis Hukum, Tindak Pidana, Biro Perjalanan.

## **ABSTRACT**

### **Fadli Muhammad Pohan**

Hajj and Umrah travel bureaus are business providers of planning services or services for organizing Umrah worship. Umrah travel agency is a business entity that can provide services on everything related to the world of Umrah pilgrimage.

The problem is the regulation of permits for organizing Hajj and Umrah travel agencies in statutory regulations, legal responsibility for Hajj and Umrah travel agencies for their pilgrims who have paid off payments and the judge's consideration of fraudulent acts committed in the Supreme Court decision Number 975 K/Pid /2021

This research is descriptive with a normative juridical approach. "The normative juridical approach is emphasizing legal science with an emphasis on secondary data, to complete the data is done by collecting relevant materials and conducting literature studies where the data will then be analyzed juridically.

It was concluded that the regulation regarding permits for organizing Hajj and Umrah travel bureaus in statutory regulations, there are six main elements in organizing the pilgrimage that must be considered: Hajj candidates, financing, administrative completeness, transportation facilities, bilateral relations between countries, implementing organizations. Legal responsibility for haj and umroh travel agents for their pilgrims who have paid off the payment. Umrah bureaus are Umrah organizers who have received permission from the Ministry of Religion of the Republic of Indonesia. Responsibilities include 3 (three) stages, namely responsibilities before departure, during departure and after departure. Responsibilities before departure, namely promotion, registration and cancellation. Responsibilities at departure, namely accommodation. Responsibility after departure is the handing over of certificates. The judge's consideration of fraudulent acts committed in the Supreme Court decision Number 975 K/Pid/202, the cassation reasons for the Cassation Petitioner/Defendant cannot be considered in the examination at the cassation level. Based on the above considerations, the *judex facti* has been right in applying the law and has not exceeded the limits of its authority. Based on the above considerations, the cassation request of the Cassation Appellant/Defendant was rejected.

Keywords: Legal Analysis, Crime, Travel Bureau.